

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama ekonomi yang terjadi di berbagai negara maju dan berkembang. Permasalahan tersebut sampai saat ini masih menjadi agenda utama dunia untuk dicarikan solusinya terutama di negara miskin dan berkembang. Pada negara berkembang mempunyai penduduk miskin yang memiliki permasalahan yang kompleks untuk diselesaikan. Menurut Sallatang (1986), kemiskinan adalah ketidak cukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan materil, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologik, dan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), pada bulan Maret tahun 2019, persentase penduduk miskin mencapai 9,41 persen turun 0,25 persen terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen dari Maret tahun 2018. Penduduk yang miskin pada bulan Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang, terjadi penurunan jumlah sekitar 0,53 juta orang dari bulan September di tahun 2018, dan turun dari bulan Maret 2018 sejumlah 0,80 juta orang. Masyarakat miskin pada daerah perkotaan bulan September 2018 sebanyak 6,89 persen, mengalami penurunan sebesar 6,69 persen saat bulan Maret 2019. Masyarakat miskin pedesaan saat bulan September 2018 sebesar 13,10 persen, mengalami penurunan sebanyak 12,85 persen saat bulan Maret 2019. Dibandingkan dengan bulan September tahun 2019, total masyarakat miskin pada bulan Maret 2019 di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 136,5 ribu masyarakat dari 10,13 juta penduduk saat bulan September 2018 menjadi 9,99 juta orang saat bulan Maret 2019. Pada daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 393,4 ribu dimulai dari 15,54 juta penduduk pada bulan September 2018 menjadi 15,15 juta orang penduduk saat bulan Maret 2019.

Garis kemiskinan pada bulan Maret 2019 sebanyak Rp425.250 kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan sebesar Rp 313.232 atau sekitar (73,66 persen), dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 112,018 atau sekitar (26,34 persen).

Pada Bulan September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia mempunyai 4,68 orang anggota rumah tangga. Besar garis kemiskinan setiap rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.990.018 rumah tangga miskin/bulan.

Menurut Adisasmita (2015), menyatakan kemiskinan memiliki indikator yang dipakai secara umum seperti, tingkat upah individu, pendapatan individu, konsumsi individu, tingkat kematian anak balita, imunisasi, pemberian gizi anak yang tidak cukup, tingkat kesuburan, kematian ibu, rata-rata harapan hidup, pendidikan, kurangnya pelayanan dan bantuan masyarakat dari pemerintah, kurangnya air bersih, perkembangan penduduk, buta huruf, penyebaran penduduk, pendapatan perkapita dan penyebaran pendapatan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadikan miskin seperti, masyarakat kurang mendapatkan pendidikan yang layak, kurangnya pelayanan dari pemerintah karena wilayah tempat tinggal yang jauh dari pusat pemerintahan, pendapatan seseorang kecil karena pekerjaan yang dilakukan tidak menentu dan masih banyak lagi.

Pendidikan sangat mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang. Apabila pendidikan seseorang tersebut rendah maka, pola pikir pengetahuan masyarakat tersebut juga rendah. Masyarakat belum bisa membuka luas wawasan untuk membuat kualitas hidup mereka akan baik. Pendidikan akan membuka wawasan seseorang sesuai dengan norma dan nilai dalam kebudayaan di masyarakat agar mencapai pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya, sehingga menjadikan orang tersebut memiliki mental yang kuat (Hasbulla, 2008).

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tercukupi mereka harus bekerja, salah satunya dengan cara membuat sebuah lapangan usaha seperti pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan masih banyak lagi. Menurut Cahyono (1998), jenis pekerjaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan. Apabila pendapatan seseorang tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka maka selama masyarakat tidak akan bisa keluar dari kemiskinan.

Wilayah tempat tinggal yang kurangnya bantuan dari pemerintah bagi masyarakat miskin. wilayah tempat tinggal pada Undang-Undang 26/2007 dibagi menjadi 2 bagian daerah yaitu, daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kebanyakan dari daerah pedesaan banyak terletak di daerah yang jauh dari perkotaan yang menjadi pusat dari pemerintahan. Daerah perkotaan menjadi pusat pelayanan sosial yang memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang mempunyai hak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pendidikan, pekerjaan, dan wilayah merupakan sedikit dari indikator masyarakat yang membuat masyarakat menjadi miskin. Pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan mengeluarkan aturan dan program, agar masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin bisa memanfaatkan program tersebut dengan baik. Salah satu cara untuk menjalankan program tersebut adalah dengan memberikan bantuan modal usaha dan pengetahuan kepada masyarakat yang dikategorikan miskin, agar masyarakat tersebut dapat melakukan jenis usaha yang dikembangkan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah membentuk sebuah program yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini tertera pada Permensos Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pada BAB 1 pasal 2.

KUBE merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi masyarakat miskin yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia, modal yang kurang dalam membentuk sebuah usaha ada jaringan dalam pemasaran mengalami keterbatasan. Pada pembentukan KUBE tingkat pendidikan akan diberikan oleh pemerintah dengan memberikan pengawasan bagi anggota KUBE agar masalah yang didapatkan oleh anggota KUBE dapat diselesaikan seperti, memberikan pendapat bawah jenis usaha apa yang dibuat agar kualitas usaha yang didirikan dapat berkembang. Pemerintah sebagai pemberi bantuan KUBE pemerintah memberikan bantuan ini kepada masyarakat yang berada di pedesaan karena masyarakat miskin banyak yang berada di pedesaan. KUBE juga merupakan salah satu cara pendekatan pemerintah kepada masyarakat yang dikategorikan miskin. KUBE dapat meningkatkan

kemampuan masyarakat miskin yang dibina agar mereka saling berinteraksi, saling bekerja sama dengan sesama anggota ataupun dengan warga masyarakat sekitar. Pengelolaan KUBE menjadikan suatu solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Menurut Afriyandi Yuli (2015), Kelompok Usaha Bersama dalam pengentasan kemiskinan struktural sangat efektif dan merupakan program yang dipandang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan kegiatan usaha dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki permasalahan mendasar untuk pengembangan usaha yaitu masalah dalam modal untuk usaha mereka. Bantuan KUBE merupakan salah satu solusi dalam masalah permodalan untuk mengembangkan sebuah usaha. Pengelolaan KUBE dari anggotanya banyak yang kurangnya komitmen dalam menjalankan usaha yang mereka buat, kemudian adanya penyelewengan modal usaha dalam keanggotaan KUBE, kurangnya kesadaran anggota dalam pemanfaatan bantuan modal dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan dari anggota untuk pengembangan KUBE.

Permasalahan eksternal juga terjadi dalam KUBE terutama kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah yang merupakan pembuat kebijakan. Banyak KUBE yang membutuhkan dan bersungguh-sungguh dalam usaha KUBE tetapi, mereka kurang mendapatkan informasi karena keterbatasan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pendidikan, jenis lapangan usaha dan wilayah tempat tinggal dengan memakai variabel kontrol jenis kelamin dan umur berpengaruh terhadap penerima KUBE miskin dengan judul penelitian “**KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI TERHADAP PELUANG ANGGOTA RUMAH TANGGA PENERIMA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) MISKIN DI INDONESIA**”

1.3 Pertanyaan Penelitian

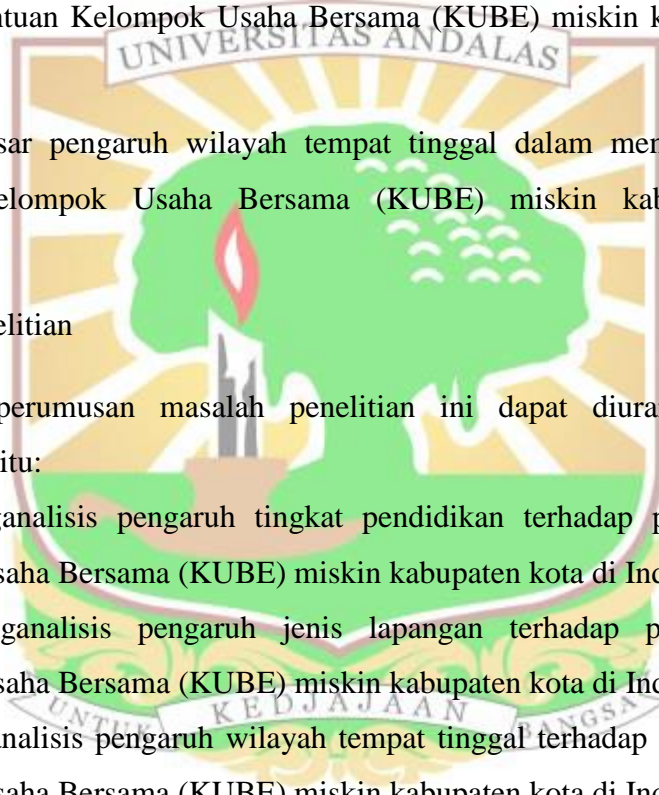
Berdasarkan latar belakang masalah maka, sesuai yang telah diuraikan menjadikan acuan agar dapat menjelaskan pokok pembahasan dari penelitian ini maka ditemukan *research problem* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dalam menentukan peluang penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh jenis lapangan usaha dalam menentukan peluang penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh wilayah tempat tinggal dalam menentukan peluang penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam perumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan tujuan dari penelitiannya yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh jenis lapangan terhadap peluang penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh wilayah tempat tinggal terhadap peluang penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) miskin kabupaten kota di Indonesia.



1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa manfaat dari penelitian:

1. Bagi Akademik

Dapat mengetahui informasi dan pengetahuan mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan faktor peluang penerima bantuan KUBE di kabupaten dan kota di Indonesia

2. Bagi Peneliti

Sebagai bahan rujukan literatur dan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerima bantuan KUBE di kabupaten dan kota di Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi bagi pemerintah yang membuat regulasi dan kebijakan dalam meningkatkan perekonomian dan pengetasan di dan kota di Indonesia

